

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi di Pulau Sulawesi yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian pada tahun 2000 diturunkannya Undang Undang No. 38 yang menyatakan pemekaran Provinsi Sulawesi Utara menjadi dua, yaitu Provinsi Sulawesi Utara dengan Ibu Kota Manado dan Provinsi Gorontalo dengan Ibu Kota Gorontalo yang pada saat itu masih berada dibawah naungan Kepolisian Wilayah (Polwil) Gorontalo Polda Sulawesi Utara.

Kemudian pada tahun 2003 tepatnya tanggal 13 Maret 2003, diturunkannya Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 12 / III / 2003 yang menyatakan bahwa Polwil Gorontalo Polda Sulawesi Utara ditingkatkan mejadi Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo, status persiapan dan menugaskan Kombes Pol Drs. Suhana Heryawan sebagai pelaksana tugas Kapolda pada Polda persiapan Gorontalo berdasarkan Telegram Kapolri No. Pol : TR / 119 / II / 2003 tanggal 18 Februari 2003 dan ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Kapolda Sulawesi Utara No. Pol : Sprin / 232 / V / 2003 tanggal 5 Mei 2003. Setelah turun keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 12 / III / 2003 tersebut maka ditetapkan Provinsi Gorontalo berada di bawah naungan Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo, dan terpisah dari Polda Sulawesi Utara

Terbentuknya Kepolisian Daerah Gorontalo diikuti dengan fungsi-fungsi yang ada dalam suatu Kepolisian Daerah. Fungsi-fungsi tersebut yaitu fungsi pembinaan yang didalamnya terdapat unsur-unsur pembantu pimpinan dan fungsi operasional yang didalamnya terdapat unsur-unsur pelaksana tugas pokok. Salah satu fungsi operasional dalam Kepolisian Daerah adalah Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas).

Saat ini Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo masih berada di dalam kompleks Polda Gorontalo. Kompleks Polda Gorontalo sendiri memiliki luas sebesar ± 11 hektar yang digunakan bersama baik untuk fungsi pembinaan maupun fungsi operasional. Sebagian besar area Kompleks Polda Gorontalo digunakan untuk fungsi operasional Ditlantas, namun karena keterbatasan ruang pada area kompleks Polda Gorontalo, masih banyak kebutuhan dan fasilitas yang seharusnya bisa dikembangkan lagi pada Ditlantas tidak dapat tertampung dan terlaksana dengan baik di dalam lingkungan Polda Gorontalo. Pada 28 Maret 2018, Kapolda Gorontalo menurunkan surat yang ditujukan kepada Kakorlantas Polri dengan tembusan Kapolri dengan Nomor : B / 800 / III / 2018 yang menyatakan bahwa akan dilaksanakannya pembangunan kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo di luar kompleks MaPolda Gorontalo yang terdiri dari beberapa kantor utama dan fasilitas PJR serta penambahan area safety riding pada Ditlantas Polda Gorontalo (Gorontalo, 2018).

Dengan diturunkannya surat Kapolda tersebut, maka dibutuhkannya perencanaan dan perancangan Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo yang dapat memenuhi persyaratan bangunan kantor kepolisian berupa Markas Komando Kepolisian Lalu Lintas Daerah yang dapat secara optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan edukasi lalu lintas serta menegakan hukum.

## **1.2 Tujuan dan Sasaran**

### **1.2.1 Tujuan**

Tujuan utama dari penyusunan laporan ini adalah mengkaji dan menyusun data menjadi landasan dari perencanaan dan perancangan bangunan kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo. Serta mendesain sebuah kantor kepolisian berupa Markas Komando Lalu Lintas Daerah yaitu Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo yang dekat dengan masyarakat guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dan dapat berfungsi sebagai sarana edukasi lalu lintas untuk masyarakat.

### **1.2.2 Sasaran**

Tersusunnya usulan langkah-langkah pokok proses (dasar) perencanaan dan perancangan Markas Komando Direktorat Lalu Lintas melalui aspek-aspek panduan perancangan dan alur pikir proses penyusunan laporan.

## **1.3 Manfaat**

### **1.3.1 Manfaat Subjektif**

1. Memenuhi syarat Tugas Akhir Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro
2. Sebagai acuan pedoman dalam proses perencanaan dan perancangan arsitektur yang merupakan rangkaian proses Tugas Akhir Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Diponegoro

### **1.3.2 Manfaat Objektif**

Perencanaan dan perancangan bangunan kantor kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo diharapkan dapat menjadi masukan bagi Polri untuk mendapatkan desain yang dapat memenuhi persyaratan dan kebutuhan markas komando lalu lintas daerah.

## **1.4 Ruang Lingkup Pembahasan**

### **1.4.1 Ruang Lingkup Substansial**

Lingkup pembahasan substansial dalam LP3A ini difokuskan pada lingkup ilmu arsitektur terutama perancangan dan perencanaan pembangunan bangunan kantor berupa markas komando kepolisian Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo yang termasuk kategori bangunan massa banyak beserta perancangan tapak lingkungan sekitarnya.

### **1.4.2 Ruang Lingkup Spasial**

Tapak yang secara administratif merupakan tapak yang berada di Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

## **1.5 Metode Pembahasan**

### **1.5.1 Metode Deskriptif**

Metode dilakukan dengan pengumpulan data yang dapat diperoleh dari: studi pustaka atau studi literatur, data dari instansi terkait, observasi lapangan serta pengumpulan data melalui internet dan referensi lain yang bisa dipertanggungjawabkan.

### **1.5.2 Metode Dokumentatif**

Melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang dianggap penting juga dengan mendokumentasikan data yang menjadi bahan penyusunan laporan yaitu dengan memperoleh gambar-gambar visual melalui foto-foto yang dihasilkan .

### **1.5.3 Metode Komperatif**

Membandingkan berbagai informasi dari pengumpulan data dengan metode deskriptif dan dari observasi langsung metode dokumentatif untuk kemudian dianalisis sesuai kebutuhan.

## **1.6 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, manfaat, ruang lingkup pembahasan, metode pembahasan, sistematika pembahasan dan alur pikir .

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi tentang teori-teori yang digunakan untuk mendukung perencanaan dan perancangan Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo.

### **BAB III TINJAUAN LOKASI**

Membahas tentang tinjauan Provinsi Gorontalo berupa data – data fisik dan nonfisik, seperti letak geografi, luas wilayah, kondisi topografi, iklim, demografi, serta kebijakan tata ruang wilayah di Gorontalo. Selain itu terdapat juga pembahasan mengenai potensi perkembangan pembangunan Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo dan faktor-faktor yang mendukung pembangunan Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo.

### **BAB IV KESIMPULAN, BATASAN DAN ANGGAPAN**

Berisikan kesimpulan, batasan dan anggapan pada perencanaan dan perancangan bangunan Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo

### **BAB V PENDEKATAN PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR**

Menguraikan analisa-analisa yang bersifat penajaman terhadap materi yang dikaitkan dengan konteks lahan perencanaan dan perancangan.

### **BAB VI PROGRAM PERENCANAAN DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR**

Mengungkapkan kesimpulan, batasan dan anggapan yang digunakan sebagai penyesuaian dalam pendekatan perencanaan dan perancangan untuk menentukan Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo.

## 1.7 Alur Pikir

